



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Kabupaten Siak Tahun 2017, merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Tahun 2017 ini juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders* pada setiap unit di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak .

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Tahun 2017 ini sebagai gambaran Capaian Kinerja SKPD yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis lingkungan.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2017 ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Siak sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) ini disusun juga sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam



mengevaluasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2017 serta sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

Performance Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2017 sebagai kontrak kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2017.

Pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Siak sebagai bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kehidupan demokrasi di Kabupaten Siak, sehingga peran penting Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penggerak untuk menumbuh kembangkan politik dan kemasyarakatan demokratis dan transparan dengan dasar moral budaya dan hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Sub Bidang Pengelolaan dan Informasi dibidang Sospol, Sosial Ekonomi dan Sosbud serta HAM khususnya memiliki makna strategis jika ditinjau dari aspek pemberdayaan Parpol, Ormas, LSM dan Organisasi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Tahun Anggaran 2017, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak berdasarkan pada Peraturan Per Undang-Undangan sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Tambahan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten siak Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
- k. Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 50);
- l. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- m. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. Tugas

Berdasarkan Perda Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Siak memiliki fungsi yaitu:

- a) Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang telah ditetapkan;
- b) Memfasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan membantu melaksanakan kegiatan PEMILU dan pendidikan politik;
- c) Pengumpulan data-data keamanan dan ketertiban masyarakat, organisasi masyarakat (ORMAS), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partai politik;
- d) Meningkatnya ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan dalam menunjang ketahanan bangsa;
- e) Meningkatnya kapasitas LSM/Orkemas, FPK, FKDM dan FKUB dalam menunjang pembangunan daerah;
- f) Melaksanakan pemantauan dan mengadakan monitoring tentang situasi keamanan dan ketertiban.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak terdiri dari :

- A. Kepala Kantor;
- B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- C. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa;
- D. Kepala Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik;
- E. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak didukung oleh tenaga Administrasi dan teknis sesuai dengan keahlian masing masing yang diharapkan memberikan kontribusi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

1. PROFIL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak NO 52 Tahun 2012 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas berubah nomenklaturnya menjadi Kantor kesatuan bangsa dan politik. Sejak berdirinya kabupaten siak berdasrakan UU No 53 Tahun 1999 yang yang diresmikan Pada 12 Oktober 2000. Kantor kesatuan bangsa dan politik sudah beberap kali mengalami perubahan nomenklatur sebelum era reformasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Kantor Sosial Politik dan sebahagian lagi dikerjakan oleh Kantor Hansip.

Salah satu perubahan yang penting dari nomenklatur kantor kesatuan bangsa dan politik adalah perubahan paradigma fungsi, yaitu fungsi pembinaan yang demban oleh kantor kesatuan bangsa dan politik pada masa lalu menjadi fungsi pemberdayaan dan fasilitas berbagai kegiatan sosial politik masyarakat, perwujudan kesatuan bangsa dan politik demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

A. Kepala Kantor

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan Kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;



- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan tata usaha kantor;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

B. Kasubbag Tata Usaha

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor.
- 2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi;
 - a. Menyusun program dan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
 - c. Menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
 - d. Melakuakan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
 - e. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;



- f. Mengelola urusan administrasi keuangan;
 - g. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
 - h. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan, program/kegiatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

C. Seksi Kesatuan Bangsa

- 1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan menyusun program kerja kesatuan bangsa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi kesatuan bangsa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana dan program tugas;
 - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan survisi pengembangan kesatuan bangsa;
 - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana pengelolaan Seksi Kesatuan Bangsa;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kesatuan bangsa;



- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

D. Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik

- 1) Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan menyusun program kerja kesatuan bangsa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana dan program tugas;
 - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan survisi pengembangan Fasilitasi Infrastruktur Politik;
 - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana pengelolaan Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Fasilitasi Infrastruktur Politik;



- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

E. Seksi Kewaspadaan Daerah

- 1) Seksi Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan menyusun program kerja kesatuan bangsa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kewaspadaan Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana dan program tugas;
 - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan survisi pengembangan Kewaspadaan Daerah;
 - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksana pengelolaan Seksi Kewaspadaan Daerah;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kewaspadaan Daerah;



- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang dibeikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Seksi Kewaspadaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Kantor.

3. SUMBER DAYA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. Sumber Daya/Aparatur

Sumber daya organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. Sumber daya ini utamanya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk mendukung aktifitas organisasi. Perencanaan program harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Beban kerja yang melebihi kemampuan dengan jumlah sumber daya yang kurang akan menjadi masalah bagi pencapaian target organisasi. Sebagaimana yang dijelaskan secara sekilas tentang sisi vital sumber daya organisasi, berikut ini akan disajikan pemetaan sumber daya manusia/aparatur organisasi yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan berbagai macam klasifikasi aparatur.



Tabel I.1
Data Aparatur Berdasarkan Klarifikasi Struktural

NO	JABATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Kantor	1
2	Kasubag Tata Usaha	1
3	Kepala Seksi	3
4	Staff	12
	JUMLAH	17

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terserap dalam jabatan structural sebanyak 5 pegawai dan staff sebanyak 12 pegawai, **hal ini mengakibatkan banyak rangkap tugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik karena terbatasnya personil.**

Tabel I.2
Data Aparatur Berdasarkan Ruang dan Golongan

NO	Golongan I dan Lain	Jumlah	Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	I/a	0	II/a	1	III/a	1	IV/a	0	2
2	I/b	0	II/b	2	III/b	2	IV/b	1	5
3	I/c	0	II/c	0	III/c	4	IV/c	0	4
4	I/d	0	II/d	0	III/d	0	IV/d	0	
5	Honorer	6							6
	Jumlah	6		3		7		1	17



Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan klarifikasi ruang dan golongan mayoritas pegawai golongan III adalah jumlah komposisi pegawai terbanyak yaitu 7 orang, dan terdapat pegawai yang belum memiliki status pegawai negeri atau berstatus honorer yaitu sebanyak 6 orang.

4. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LKP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Perjanjian Kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di raih selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Didalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan politik terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017.

Visi Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang bersatu, harmonis, demokratis, partisipasif dan terciptanya suasana yang aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu”.

Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak adalah

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan partisipatif;
3. Mewujudkan situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif.



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Siak Tahun 2017 merupakan perencanaan kinerja yang menyajikan sasaran strategis, indikator dan target kinerja, program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan serta, pagu indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dapat diketahui bahwa didalamnya terdapat 2 (dua) sasaran beserta 2 (dua) indikator kinerja yang akan menjadi ukuran keberhasilan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penyusunan dokumen Perjanjian kinerja) Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2017 merupakan implementasi dari rencana kinerja tahunan dan dokumen pelaksanaan anggaran yang dirumus berdasarkan sasaran strategi, program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis dengan memperhatikan dan menselaraskan pada Indikator Kinerja Utama (terlampir). Perjanjian kinerja merupakan tolak ukuran dan sebagai langkah awal dalam penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga tugas dan wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan SKPD dapat dinilai dan dievaluasi keberhasilan capaian kerjanya. Untuk mengetahui secara lengkap mengenai Perjanjian Kinerja. Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada



sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Kantor Kesatuan Bangsa dan politik tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.1
PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KESATUANBANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (BAIK)
		Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	B
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik Sosial	9 Konflik
3.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Sara	0 Konflik
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	74%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



Dari penyajian data Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada tabel diatas, terdapat 2 (dua) Sasaran beserta 2 (dua) Indikator kinerja yang akan diukur capaian keberhasilannya. Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja sebagaimana tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensinya, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan politik melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal perencanaan dan penganggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017. Untuk mengetahui perbandingan anggaran sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2017 berdasarkan kode belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.2
Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Siak Tahun 2017 (sebelum dan sesudah perubahan)

KODE REK	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	BELANJA DAERAH	2.733.229.756,00	2.406.436.512,00	-326.793.244,00	-11,96
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.082.517.656,00	804.424.412,00	-278.093.244,00	-25,69
5 . 1 . 1	BELANJA PEGAWAI	1.082.517.656,00	804.424.412,00	-278.093.244,00	-25,69
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.650.712.100,00	1.602.012.100,00	-48.700.000,00	-2,95
5 . 2 . 1	BELANJA PEGAWAI	129.600.000,00	129.600.000,00	00	-



5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.521.112.100,00	1.472.412.100,00	-48.700.000,00	-3,20
-----------	----------------------------	------------------	------------------	----------------	-------

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan penyajian tabel perubahan anggaran sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa anggaran belanja langsung Tahun 2017 sebesar **Rp. 1.082.517.656,00**. sedangkan untuk belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar **Rp. 1.650.712.100,00**. Jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.733.229.756,00**. Sedangkan pada APBD Perubahan anggaran belanja langsung menjadi sebesar **Rp. 1.602.012.100,00** (berkurang sebesar **Rp. -48.700.000,00**), sedangkan untuk belanja tidak langsung menjadi sebesar **Rp. 804.424.412,00**. (berkurang **Rp -278.093.244,00**) jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung setelah APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar **Rp. 2.406.436.512,00**. Jumlah keseluruhan anggaran setelah APBD Perubahan berkurang sebesar **Rp. -326.793.244,00**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak disusunlah sasaran strategis yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar reformasi birokrasi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak yang menyangkut penataan organisasi, peningkatan dibidang sosial politik dan ketertiban masyarakat. Sasaran strategis tersebut diimplementasikan dalam 3 **(tiga) sasaran strategis**, yaitu;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (BAIK)
		Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	B
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik Sosial	9 Konflik
3.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Sara	0 Konflik



4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	74%
----	---	---	-----

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Siak telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *good and clean governance* untuk melahirkan aparatur pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terus bergulir reformasi gelombang pertama, utamanya dalam lima tahun terakhir telah memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III.1 RENTANG NILAI DAN KATAGORI CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)
1.	≥ 85%	Sangat Baik
2.	70% sampai dengan < 85%	Baik
3.	55% sampai dengan < 70%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sejalan dengan pengelompokan capaian kinerja diatas, dapat dirincikan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Siak tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel III.2
Rincian Pencapaian Kinerja Sasaran Menurut Kategori Capaian Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN	<55%	55% s/d <70%	70% s/d <85%	>85%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Baik	Baik			76,59		
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9 Konflik	Baik			73,08		
3.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	0 Konflik	Cukup		65,43			
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	74%	Baik			75,66		

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melampaui target (>100%) sebanyak 0 indikator kinerja.
2. Sesuai dengan target (=100%) sebanyak 2 indikator kinerja.
3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 0 indikator kinerja.



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan diatas menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian indikator tersebut pada masing-masing sasaran strategis antara lain :

1. Sasaran Strategis ke Satu :

“Meningkatnya pelayanan dan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik”

Indikator Kinerja :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran kesatu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Program Administrasi Perkantoran, indikator programnya adalah Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator programnya adalah Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator dari program ini adalah Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran ini terlihat bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merealisasi persentase sebesar **76,59%** termasuk kategori capaian **baik**. Untuk mengetahui realisasi dan persentase besar nilai pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;



Tabel.III.3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun Lalu
Pada Sasaran Dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			2017	2017	
1.	Meningkatnya pelayanan dan kinerja Kantor Kesatuan bangsa dan politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	867.064.600,00	664.041.682,00	76,59%
		Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

A. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN SASARAN KESATU

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kesatu dengan indikator kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* didukung oleh Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran **Rp. 819.514.600,00-** dan direalisasikan sebesar **Rp. 619.816.682,00-** atau sebesar **75.63%**, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran **Rp. 47.550.000,00-** dan direalisasikan sebesar **Rp. 44.225.000,00-** atau sebesar **93,01%**. Untuk mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel III.4
Realisasi Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Capaian Kinerja Pada Sasaran KesatuTahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN					% Target	KET	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	1..Penyediaan jasa surat menyurat	input :						
		Jumlah dana	Rupiah	2.250.000,00	2.247.000,00	99,87%		
		Output:						
		Jenis dan jumlah perangko materai dan perangko surat	Jenis	2	2 Jenis	100,00%		
		Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran						
	2..Penyediaan jasa komunikasi ; sumber daya air dan listrik	input :						
		Jumlah dana	Rupiah	57.600.000,00	37.841.382,00	65,70%		
		Output:						
		Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jenis	3	3 Jenis	100,00%		
		Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran						
	3.. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	input :						
		Jumlah dana	Rupiah	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00%		
Output:								
Jumlah Petugas Administrasi Keuangan		Orang	2	2 Orang	100,00%			
	Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran							
4..Penyediaan jasa kebersihan	input :							



kantor	Jumlah dana	Rupiah	23.300.000,00	23.300.000,00	100,00%
	Output:				
5.. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Orang	2	2 Orang	100,00%
	Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				
5.. Penyediaan alat tulis kantor	input :				
	Jumlah dana	Rupiah	84.408.200,00	83.408.200,00	98,82%
5.. Penyediaan alat tulis kantor	Output:				
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jenis	34	34 Jenis	100,00%
6.. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				
	input :				
6.. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dana	Rupiah	56.458.400,00	56.458.400,00	100,00%
	Output:				
6.. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	6	6 Jenis	100,00%
	Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				
7.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	input :				
	Jumlah dana	Rupiah	3.628.000,00	2.628.000,00	72,44%
7.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output:				
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5 Jenis	100,00%
7.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				
	input :				
8.. Penyediaan	input :				



	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dana	Rupiah	9,300.000,00	9.300.000,00	100,00%	
		Output:					
		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	8	8 Jenis	100,00%	
		Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					
	9.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	input :					
		Jumlah dana	Rupiah	341.310.000,00	182.393.700,00	53,44%	
		Output:					
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	48	48 Kali	100,00%	
		Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					
	10.. Penyediaan jasa keamanan kantor	input :					
		Jumlah dana	Rupiah	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00%	
		Output:					
		Jumlah tenaga keamanan kantor	Orang	2	2 Orang	100,00%	
		Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					
	11.. Penyediaan jasa administrasi kantor	input :					
		Jumlah dana	Rupiah	71.100.000,00	71.100.000,00	100,00%	
		Output:					
		Jumlah tenaga administrasi kantor	Orang	5	5 Orang	100,00%	
		Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					
	12.. Kunjungan	input :					



2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	Jumlah dana Output:	Rupiah	108.960.000,00	93.000.000,00	85,35%
		Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dikecamatan dalam kabupaten siak Outcome: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kali	108	108 Kali	100,00%
	1.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	input : Jumlah dana Output:	Rupiah	36.600.000,00	36.075.000,00	98,57%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara Outcome: Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	2	2 Unit	100,00%
	2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	input : Jumlah dana Output:	Rupiah	10.950.000,00	8.150.000,00	74,43%
		Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan kantor Outcome: Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis	5	5 Jenis	100,00%
Jumlah				Rp. 867.064.600,00	Rp. 664.041.682,00	75,63%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



Jika dilihat dari persentase capaian kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan dapat direalisasikan dengan baik sesuai kebutuhan, sisa anggaran terjadi disebabkan karena dilakukannya rasionalisasi anggaran pada belanja barang dan jasa.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan total anggaran **Rp. 2.250.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 2.247.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **99.87 %**;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik, dengan total anggaran **Rp. 57.600.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 37.841.382,00,-** dengan capaian persentase sebesar **65,70 %**; kegiatan ini tidak terealisasi dengan baik karena pada salah satu item belanja jasa air sebesar **Rp. 6.000.000,00,-**
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan total anggaran **Rp. 32.400.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 32.400.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **100.00 %**;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan total anggaran **Rp. 23.300.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 23.300.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **100.00 %**;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan total anggaran **Rp. 84.408.200,00,-** dengan realisasi **Rp. 83.408.200,00,-** dengan capaian persentase sebesar **98.82 %**;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan total anggaran **Rp. 56.458.400,00,-** dengan realisasi **Rp. 56.458.400,00,-** dengan capaian persentase sebesar **100.00 %**;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan total anggaran **Rp. 3.628.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 2.628.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **72.44 %**;



- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan total anggaran **Rp. 9.300.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 9.300.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **100.00 %**;
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan total anggaran **Rp. 341.310.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 182.393.700,00,-** dengan capaian persentase sebesar **53.44 %**;
- j. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan total anggaran **Rp. 28.800.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 28.800.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **100.00 %**;
- k. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor, dengan total anggaran **Rp. 71.100.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 71.100.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **100.00 %**;
- l. Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah, dengan total anggaran **Rp. 108.960.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 93.000.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **85.35 %**;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pemeliharaan Rutun/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional (Servis), dengan total anggaran **Rp. 36.600.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 36.075.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **98,57 %**;
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor, , dengan total anggaran **Rp. 10.950.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 8.150.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **74,43 %**;



2. Sasaran Strategis kedua :

“Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan”

Indikator Kinerja :

Jumlah Konflik Sosial

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran kedua, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran ini terlihat bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merealisasi persentase sebesar **73,08 %** termasuk kategori capaian **baik**. Untuk mengetahui realisasi dan persentase besar nilai pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel.III.5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun Lalu
Pada Sasaran Dan Indikator Kinerja

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	% CAPAIAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	423.902.500,00	309.755.640 ,00	73,08%
TOTAL				73,08%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



A. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN SASARAN KEDUA

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kedua dengan indikator kinerja *Jumlah Konflik Sosial* didukung oleh Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran Rp. 423.902.500,00. dan direalisasikan sebesar Rp. 309.755.640,00. atau sebesar 73.08 %.

Tabel III.6
Realisasi Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja
Pada Sasaran Kedua Tahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN					% PEN. TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1..Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1..Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	input :					
		Jumlah dana	Rupiah	136.202.500,00	94.309.640,00	69,24%	
		Output:					
		Jumlah Dewan Penasehat dan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Orang	28	28 Orang	100,00%	
		Outcome: Terpeliharanya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat					



2.. Operasional Komunitas Intelijen Daerah	input :					
	Jumlah dana	Rupiah	154.770.000,00	119.430.000,00	77,17%	
	Output:					
	Jumlah Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Orang	26	26 Orang	100,00%	
Outcome: Terpeliharanya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat						
3.. Operasional Tim Terpadu Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	input :					
	Jumlah dana	Rupiah	132.930.000,00	96.016.000,00	72,23%	
	Output:					
	Jumlah anggota Tim Terpadu	Orang	45	45 Orang	100,00%	
Outcome: Terpeliharanya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat						
Jumlah			Rp. 423.902.500,00	Rp. 309.755.640,00	73,08%	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Di dukung dengan beberapa kegiatan antara lain;

- a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan total anggaran **Rp. 136.202.500,00,-** dengan realisasi **Rp. 94.309.640,00,-** dengan capaian persentase sebesar **69,24 %**;
- b. Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah, dengan total anggaran **Rp. 154.770.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 119.430.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **77,17 %**;
- c. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dengan total anggaran **Rp. 132.930.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 96.016.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **72,23 %**;

3. Sasaran Strategis ketiga :

“Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan

Indikator Kinerja :

Jumlah Konflik Sara

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran ketiga, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran ini terlihat bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merealisasi persentase sebesar **65,43 %** termasuk kategori capaian **cukup**. Untuk mengetahui realisasi dan persentase besar nilai pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;



Tabel.III.7
Realisasi Capaian Kinerja Tahun Lalu
Pada Sasaran Dan Indikator Kinerja

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	% CAPAIAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengembangan wawasan kebangsaan	161.365.000,00	105.579.000,00	65,43
TOTAL				65,43%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

B. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN SASARAN KETIGA

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kedua dengan indikator kinerja *Jumlah Konflik Sara* didukung oleh Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran **Rp. 161.365.000,00,-** dan direalisasikan **sebesar Rp. 105.579.000,00,-** atau sebesar **65,43 %**.



Tabel III.8
Realisasi Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja
Pada Sasaran Kedua Tahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN					% PEN. TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1. Pelatihan Dasar Bela Negara	input :					
		Jumlah dana	Rupiah	106.565.000,00	62.679.000,00	58,82%	
		Output:					
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	60	60 Orang	100,00%	
		Outcome: Terwujudnya Masyarakat yang Cinta Tanah Air					
	2. Peringatan Upacara Hari Bela Negara	input :					
Jumlah dana		Rupiah	54.800.000,00	42.900.000,00	78,28%		
Output:							
	Jumlah peserta yang mengikuti upacara	Orang	500	500 Orang	100,00%		
	Outcome: Terwujudnya Masyarakat yang Cinta Tanah Air						
Jumlah				Rp. 161.365.000,00	Rp. 105.579.000,00	65,43%	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Di dukung dengan beberapa kegiatan antara lain;

- a. Kegiatan Pelatihan Dasar Bela Negara dengan total anggaran **Rp. 106.565.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 62.679.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **58,82 %**;
- b. Kegiatan Peringatan Upacara Hari Bela Negara, dengan total anggaran **Rp. 54.800.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 42.900.000,00,-** dengan capaian persentase sebesar **78,28%**;

4. Sasaran Strategis keempat :

“Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan”

Indikator Kinerja :

Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran keempat, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat, hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran ini terlihat bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merealisasi persentase sebesar **75,66 %** termasuk kategori capaian **baik**. Untuk mengetahui realisasi dan persentase besar nilai pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;



Tabel.III.9
Realisasi Capaian Kinerja Tahun Lalu
Pada Sasaran Dan Indikator Kinerja

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	% CAPAIAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan Politik Masyarakat	149.680.000,00	113.241.000,00	75,66%
TOTAL		75,66%		

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

C. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN SASARAN KEEMPAT

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran keempat dengan indikator kinerja *Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah* didukung oleh Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran **Rp. 149.113.000,00,-** dan direalisasikan sebesar **Rp. 113.241.000,00,-** atau sebesar **75,66 %**.

Tabel III.10
Realisasi Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja
Pada Sasaran Kedua Tahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN					% PEN. TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Koordinasi Forum - Forum Politik	<i>input :</i>			82.221.000,00	82,14%	
		Jumlah dana	Rupiah	100.100.000,00			



2. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik	<p>Output:</p> <p>Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan</p>	Orang	60	60 Orang	100,00%
	<p>Outcome:</p> <p>Terpeliharanya stabilitas politik pada masyarakat</p>				
	<p>input :</p> <p>Jumlah dana</p>	Rupiah	49.580.000,00	31.020.000,00	62,57%
	<p>Output:</p> <p>Jumlah peserta rapat bantuan keuangan partai politik</p>	Orang	45	45 Orang	100,00%
	<p>Outcome:</p> <p>Terpeliharanya stabilitas politik pada masyarakat</p>				
Jumlah			Rp. 149.680.000,00	Rp. 113.241.000,00	75,66%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, maka pada tahun 2017 telah dilaksanakan 5 program yang terdiri dari 21 Kegiatan (sesuai APBD-P) dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.406.436.512,00,-** Dan direalisasikan sebesar **Rp. 1.987.023.509,00**. Dari 21 Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran kesatu, dan kedua telah direalisasikan anggaran sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kesatu dengan Indikator kinerja Utama **Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang terdiri dari 14 kegiatan. Adapun jumlah anggaran dana yang dianggarkan untuk 14 (empat belas) kegiatan tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 867.064.600,00,-** (*delapan ratus enam puluh tujuh juta enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*) dan direalisasikan sebesar **Rp. 664.041.682,00,-** (*enam ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*) atau sebesar **(76,59%)**. Anggaran tersebut bersisa sebesar **Rp. 203.022.918,00,-** (*Dua ratus tiga juta dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah*). Sisa anggaran terjadi karena adanya rasionalisasi terhadap belanja langsung pada Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah.
2. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kedua yaitu **Jumlah Konflik Sosial**. Pencapaian sasaran kedua ini dilakukan melalui 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 423.902.500,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 309.755.640,00,-** atau sebesar **(73,07 %)**.



3. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ketiga dengan Indikator kinerja Utama **Jumlah Konflik Sara** dilaksanakan melalui Program Pengembangan wawasan Kebangsaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 161.365.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 105.579.000,00,-** atau sebesar **(65,43%)**.

4. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran keempat dengan Indikator kinerja Utama **Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah** dilaksanakan melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 149.680.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 113.241.000,00,-** atau sebesar **(75,66 %)**



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak telah berupaya memberikan Informasi mengenai pencapaian sasaran yang disajikan melalui hasil dari pengukuran kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Renstra dan perjanjian kinerja tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sasaran kesatu : ***Meningkatnya pelayanan dan kinerja Kantor Kesatuan bangsa dan politik*** Indikator dari sasaran ini adalah : ***Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*** Sesuai dengan target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 sebesar **Rp. 867.064.600,00,-** (*delapan ratus enam puluh tujuh juta enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*) dan direalisasikan sebesar **Rp. 664.041.682,00,-** (*enam ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*) atau sebesar **(76,59%)**. Dengan kategori capaian **Baik**.
2. Sasaran kedua : ***Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan***. Indikator dari sasaran ini adalah : ***Jumlah Konflik Sosial***. Sesuai dengan target yang direncanakan dalam renstra dan perjanjian kinerja kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 adalah **Rp. 423.902.500,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 309.755.640,00,-** atau sebesar **(73,07 %)**. Dengan kategori capaian **Baik**.
3. Sasaran ketiga : ***Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan***. Indikator dari sasaran ini adalah : ***Jumlah Konflik Sara***. Sesuai dengan target yang



direncanakan dalam renstra dan perjanjian kinerja kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 adalah **Rp. 161.365.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 105.579.000,00,-** atau sebesar **(65,43%)**. Dengan kategori capaian **Cukup**.

4. Sasaran keempat : **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik**. Indikator dari sasaran ini adalah : **Jumlah Konflik Sara. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah** Sesuai dengan target yang direncanakan dalam renstra dan perjanjian kinerja kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 149.680.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 113.241.000,00,-** atau sebesar **(75,66%)**. Dengan kategori capaian **Baik**.

Realisasi anggaran tahun 2017 dari jumlah total belanja langsung sebesar **Rp. 1.602.012.100,00,-** Dan direalisasikan sebesar **Rp. 1.192.617.322,00,-** sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar **98,10 %**. Beberapa hal yang menjadi hambatan dan perlu perbaikan dimasa akan datang sebagai berikut :

1. Terdapat pekerjaan yang sudah di anggarkan tetapi belum dapat dilaksanakan.
2. Masih ada kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja dan laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kinerjanya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan berupaya melakukan langkah pemecahan masalah diantaranya :

1. Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis.



2. Meningkatkan disiplin penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya beserta sarana dan prasarana yang ada.

Dari beberapa persoalan tersebut diatas, direkomendasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan harus sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
2. Pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai rencana.
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sesuai kompetensi.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bagian penutupan dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya, indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 telah dapat dicapai atau belum, sebagian besar telah dapat di realisasikan 100 % hal yang sekaligus menunjukkan adanya komitmen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seluruh capaian kinerja tersebut baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan analisis kami atas capaian kinerja 2017, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi



pemecah masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Siak mempertimbangkan agar dapat mendanai kegiatan yang mendukung sasaran lainnya yang belum dapat terlaksana;
2. Perlunya dukungan stake holders terhadap indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perlu adanya antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul sesuai perkembangan kehidupan antar pemeluk agama suku kelompok;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perkembangan parpol, orkemas dan organisasi profesi di Kabupaten Siak.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengharapkan agar Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami pada stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja.